

PERAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PADA KAMPUNG WADIO DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

Letarius Tunjanan ¹⁾

^{1,)} Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Satya Wiyata Mandala

Email :

letariustunjanan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana peran kepala kampung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada kampung Wadio, serta kendala apa yang dihadapi kepala kampung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada kampung Wadio. Upaya apa saja yang di lakukan kepala kampung/pemerintah kampung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada kampung Wadio . Hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Wadio yaitu Fungsi peran kepala kampung sebagai pimpinan kampung tidak berjalan dengan maksimal dalam hal pemberian motivasi, semangat dan dorongan kepada masyarakat untuk hal – hal meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kampung. Kepala kampung kurang bersosialisasi dengan masyarakat kampung dan hanya pada orang – orang tertentu saja. Kepala kampung sebagai salah satu fasilitator pada kampung tidak menjalankan tugasnya dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas penambah untuk menunjang pekerjaan masyarakat. Sebagai pimpinan kampung, kepala kampung belum memiliki kemampuan menggerakkan masyarakat kampung dalam kegiatan – kegiatan kampung. Kurangnya pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan perekonomian

Kata Kunci : Kepala Kampung, Pemerintah kampung, Ekonomi Masyarakat, Nabire Barat,

ABSTRACT

This research aims to find out the extent of the role of the village head in improving the community economy in Wadio village, as well as what obstacles the village head faces in improving the community economy in Wadio village. What efforts have been made by the village head/village government to improve the economy of the community in Wadio village? The results of research conducted in Wadio Village are that the function of the village head as village leader is not running optimally in terms of providing motivation, enthusiasm and encouragement to the community for things that improve the economy and welfare of the village community. The village head does not socialize much with the village community and only with certain people. The village head as one of the facilitators in the village does not comply with the applicable provisions. There is no provision of assistance to the community in the form of additional facilities to support community work. As a village leader, the village head does not yet have the ability to mobilize the village community in village activities. Lack of approach to the community to understand economic developments

Keywords: Village Head, Village Government, Community Economy, West Nabire,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Negara Republik Indonesia pada saat ini terus menerus mengalami peningkatan. Peningkatan ini didasari oleh pelaksanaan pembangunan nasional yang merata diseluruh Indonesia. Dari peningkatan pembangunan tersebut maka akan mempengaruhi pertumbuhan daerah sehingga laju pertumbuhan antara kampung dan kota makin seimbang. Pembangunan nasional, pemerintah meningkatkan pembangunan pada perkampungan. Peningkatan pembangunan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal dan bekerja umumnya petani dan pedagang. Pemerintah kampung merupakan pemerintah terendah sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan masyarakat, maka kedudukan kampung dalam proses pembangunan sangatlah penting. Karena kampung merupakan daerah yang harus dimaksimalkan, pemerintah memberikan program – program pembangunan, pelatihan, dan pemberian sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan kampung. Guna memenuhi unsur pemerataan pembangunan langkah seperti program –

program pemerintah, pemberian pelatihan kepada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang hasil – hasilnya berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kampung bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakat untuk mempertahankan standar hidup yang layak maka pemerintah kampung berhak mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan sesuatu hal yang pengelolaannya harus tepat agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan cara yang bijak akan menghasilkan dampak efisiensi penggunaan sumber daya dan sebagai ciri khas daerah. Contoh pemanfaatan bijak ini dapat dilihat pada kampung wadio yaitu suatu kampung di Kabupaten Nabire yang mayoritasnya adalah petani sayur – sayuran dan buah – buahan yang hasil perkebunan tersebut dapat menunjang ekonomi masyarakat kampung. Dari cara tersebut dapat disimpulkan dengan pemanfaatan lahan dan hasil bumi serta mengetahui potensi daerah hasil tanaman yang baik dan bernilai jual.

Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat sebagaimana diketahui kesejahteraan erat kaitannya dengan pemberdayaan. Kaitan tersebut karena pemberdayaan merupakan suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yang menjadi hak seluruh masyarakat. Maka dari itu, pembangunan perkampungan merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber potensi alam yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

Potensi sumber daya alam di kampung Wadio umumnya diarahkan pada sector pertanian karena memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Pemanfaatan kekayaan alamnya seharusnya tidak lepas dari peran pemerintah kampung yang wajib memberikan program – program guna memaksimalkan potensi kampung untuk kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Program – program tersebut berupa pelatihan dan pembangunan infrastruktur yang berguna bagi kepentingan masyarakat yang dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat serta peningkatan mutu dari hasil produksi pertanian. Melalui program – program tersebut, pemerintah dapat menyalurkan bantuan yang berupa bantuan material maupun non material. Penyaluran bantuan non material umumnya yaitu pelatihan masyarakat, pelatihan aparatur kampung dan penyuluhan di kampung tersebut. Sedangkan yang berupa material berupa fasilitas – fasilitas yang menunjang hasil produksi masyarakat seperti irigasi, penyediaan obat – obatan dan pupuk.

Permasalahan yang terjadi di kampung Wadio yaitu semakin hari jumlah masyarakat yang masih memilih bertani semakin kecil. Masyarakat lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan dan instansi – instansi pemerintah dan serta swasta lainnya sehingga sector pertanian tidak dianggap menjanjikan lagi. Dari data yang didapatkan menunjukkan mayoritas pemuda dengan lulusan SMA atau sederajat rata – rata tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, lebih memilih bekerja sebagai pedagang, buruh, dan banyak pula yang bekerja di luar daerah sebagai karyawan perusahaan. Dari permasalahan ini, pergeseran petani yang lama (tua) lambat laun akan digantikan dengan generasi mudanya sekarang. Dengan demikian peran kepala kampung sebagai pimpinan pemerintahan kampung seharusnya dapat mengantisipasi dan memberikan penyuluhan dan pelatihan serta memotivasi masyarakatnya agar mendapatkan dorongan dan menyadari bahwa sector pertanian adalah sector kebutuhan yang paling penting bagi kemajuan ekonomi masyarakat kampung.

Permasalahan lain yang terjadi kurangnya hasil panen dan kualitas yang menurun. Maka yang diperlukan seharusnya pemerintah kampung memberikan bantuan dalam bentuk bibit, pupuk kepada masyarakat sebagai penunjang. Pemerintah kampung kurang

tanggap dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kampung sehingga masyarakat tidak merasa puas. Langkah yang tepat dilakukan pemerintah kampung seharusnya dapat membuka kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung.

Sebagaimana kampung pada umumnya, seharusnya kampung memiliki hasil bumi dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia secara mandiri sehingga peningkatan ekonomi masyarakat kampung menjadi maksimal. Dengan pengelolaan yang baik maka kesejahteraan kampung dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Jika kesejahteraan membaik tujuan utama pemerintah dalam pembangunan kampung akan membaik atau tercapai. Menurut Sugiyono (2012 : 52), berpendapat bahwa, dalam penelitian landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan – coba – coba.

Peran Kepala Kampung (Variabel Bebas “X”)

Pengertian Peran

Menurut Lepa dkk (2019 : 3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma – norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Kepala Kampung

Kepala kampung diberi tugas untuk memegang wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan kampung, ia harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintahan kampung agar pemerintahan kampung berjalan kampung dengan baik. Kepala kampung tidak terlepas dari peran serta kedudukannya maka dari itu kepala kampung harus bisa menjamin keinginan serta kebutuhan masyarakat kampung dan mengutamakan kepentingan kampung yang memang proiritas terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Wahyudi dkk (2019 : 372) kepala kampung adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai seseorang yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam pemerintahan. Kepala kampung mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program – program serta arapat yang dilakukan oleh kepala kampung.

Indikator Peran Kepala Kampung

Adapun indikator peran kepala kampung menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000 : 42), yaitu (a) Motivator (b).Fasilitator (c)Mobilisator

Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Variabel Terikat “Y”)

Pengertian Ekonomi Masyarakat

Menurut Mubaryo (1999 : 81), dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem Ekonomi (dari kapitalis menuju ekonomi kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain (2006 : 98), dalam bukunya yang berjudul kewirausahaan (strategi pemberdayaan usaha kecil menengah dan penduduk miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu system ekonomi yang harus dianut sesuai

dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada ekonomi rakyat.

Ciri – Ciri Ekonomi Rakyat

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo (2001 : 4), mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri – ciri tersebut adalah sebagai berikut (a) Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan potensi tenaga bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja. (b) Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah – langkah yang ramah pasar. (c) Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya mnciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan. (d) Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. (e) Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral..

Prinsip – Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu mempunyai prinsip – prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi.

Langkah – Langkah Mengembangkan Ekonomi

Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu : (1) Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koprasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya. (2) Melakukan program – program pembinaan terhadap pelaku – pelaku tersebut melalui program pendamping. (3) Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaa terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Aspek – Aspek Yang dipersiapkan Dalam Mempersiapkan Ekonomi Kerakyatan

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan yaitu : Aspek pembinaan, Aspek pembiayaan, Aspek kemitraan, Aspek yuridis formal.

Hal – Hal Yang Harus diperhatikan Pada Sistem Ekonomi Saat Ini Yang Akan diarahkan Pada Ekonomi Kerakyatan

Adapun hal – hal yang harus diperhatikan pada sistem ekonomi sekarang ini yang akan di arahkan pada ekonomi kerakyatan yaitu : (1)Perhatikan karakteristik daerah serta latar belakang keahlian mayoritas masyarakat setempat. (2) Kembangkan ekonomi berbasis rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keahlian mayoritas masyarakat setempat. (3) Perhatikan ciri khas atau karakteristik daerah, dengan meningkatkan nilai (value) dari potensi yang ada. (4).Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui perbaikan infastruktur atau fasilitas apapun agar ekonomi rakyat tumbuh. (5) Mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal/UMKM dengan pemberdayaan pembentukan koperasi produktif.

METODE PENELITIAN

Pembatasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas/lebar sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu luas kepada aspek – aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dengan demikian penulis membatasi masalah pada “Peran Kepala Kampung Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat”.

Perumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015 : 228), rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data dilapangan.

Dengan pengertian diatas maka rumusan masalah ini adalah : Se jauh mana peran kepala kampung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada kampung Wadio, serta kendala apa yang dihadapi kepala kampung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada kampung Wadio. Upaya apa saja yang di lakukan kepala kampung/pemerintah kampung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada kampung Wadio ?

Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Kampung Wadio adalah salah satu kampung yang ada di Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. Dengan demikian populasi adalah keseluruhan masyarakat kampung wadio yang berjumlah 1.957 orang.

Yaitu tahap dimana data dikategorikan berdasarkan jawaban responden dan menempatkan sesuai dengan porsi nya masing – masing. Data yang dikumpul kemudian dimasukan dalam bentuk tabel berdasarkan kategori jawaban dengan melihat jawaban responden. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus perhitungan prosentase (Anto Dajan).

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

P = Prosentase

f = Frekuensi

N = Responden

100% = Angka Konstan

PEMBAHASAN

Peran Kepala Kampung (Variabel Bebas “X”)

1.Motivator

Sesuai penyajian data pada Analisa hasil dari responden tentang kepala kampung selalu berperan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, diperoleh jawaban bahwa pada kategori jawaban memiliki jawaban dari responden terbanyak adalah kategori jawaban tidak pernah sebanyak 22 responden atau 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kepala kampung selaku pimpinan pada kampung belum menjalankan tugasnya dengan maksimal, hal ini juga karena kepala kampung yang kurang mengadakan pertemuan – pertemuan dengan masyarakat atau ketua – ketua RT setempat untuk bersosialisasi serta memberikan motivasi kepada masyarakat, dan juga kepala kampung yang kurang melakukan pendekatan baik dengan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala kampung beliau selalu aktif dalam memberikan semangat dan dukungan kepada masyarakatnya, diperoleh jawaban pada kategori jawaban memiliki jawaban terbanyak adalah kategori jawaban tidak pernah sebanyak 21 responden atau 52,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya kepala kampung kurang melakukan pendekatan dengan seluruh masyarakat dengan merata sehingga dalam memberikan motivasi sebagai suatu dorongan kepada masyarakat tidak berjalan baik, dan tidak diterima oleh semua atau sebagian masyarakat pada kampung wadio.

2.Fasilitator

Terkait sebagai fasilitator, penilaian responden menyatakan kepala kampung selalu bertindak dalam hal memberikan fasilitas seperti pendukung untuk menunjang kegiatan atau pekerjaan yang di jalankan oleh masyarakatnya, diperoleh jawaban pada kategori jawaban terbanyak adalah kategori jawaban tidak selalu sebanyak 26 responden atau 65%. Hal ini menunjukkan bahwa kepala tidak selalu dapat memberikan fasilitas kepada semua masyarakat kampung dalam menunjang pekerjaan masyarakat. Hal ini juga dikarenakan dana desa yang tidak dikelola dengan baik sehingga dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tidak bisa berjalan baik dan merata, sehingga masyarakat menjalankan pekerjaan dengan apa adanya.

3.Mobilisator

Tentang mobilisator sebagai pimpinan dalam kampung, kepala kampung mampu menggerakkan masyarakatnya dalam hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, diperoleh jawaban pada kategori jawaban terbanyak adalah kategori jawaban tidak mampu sebanyak 18 responden atau 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kepala kampung sebagai pimpinan kurang mampu untuk menggerakkan masyarakatnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena kepala kampung yang sangat kurang melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat dalam hal pemberian motivasi kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat lebih cenderung bergerak sendiri.

Kepala kampung selalu mengajak masyarakatnya melakukan kegiatan dalam kampung secara gotong royong, diperoleh jawaban pada kategori jawaban terbanyak adalah kategori jawaban tidak pernah sebanyak 25 responden atau 62,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala kampung sangat kurang dalam mengajak masyarakatnya untuk melakukan kegiatan kampung secara bersama. Hal ini juga dikarenakan kepala kampung yang sering tidak berada pada tempat/kediamannya, sehingga cenderung lebih banyak ketua – ketua RT yang bertindak.

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Variabel Terikat “Y”)

1.Melakukan Identifikasi

Kepala kampung selalu memantau perekonomian masyarakat kampung, diperoleh jawaban terbanyak pada kategori jawaban tidak pernah sebanyak 17 responden atau 42,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kepala kampung belum maksimal dalam hal melihat perkembangan perekonomian masyarakat kampung, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat kampung lebih tidak memilih untuk mengharapkan bantuan dari pihak kampung dikarenakan kepala kampung yang sering mengabaikan perekonomian masyarakat dan lebih memilih – milih dalam memberikan bantuan.

Tentang selalu melihat potensi yang baik dalam mengembangkan usaha pribadi masyarakatnya, diperoleh jawaban terbanyak pada kategori jawaban selalu sebanyak 16

responden atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat selalu dan dapat melihat potensi yang baik untuk mengembangkan usaha pribadinya, hal ini dikarenakan pengalaman – pengalaman masyarakat dalam meningkatkan usaha pribadi, sehingga masyarakat tidak terlalu memerlukan bantuan atau saran dari pihak pemerintah kampung untuk meningkatkan usaha pribadinya.

2. Program Pendidikan/Pelatihan

Tentang paletihan selalu di adakan dari pemerintah kampung yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Diperoleh jawaban terbanyak pada kategori jawaban tidak pernah sebanyak 28 responden atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pemberian pelatihan dari pihak aparat kampung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sangat kurang atau sangat jarang diadakan, hal ini juga dikarenakan pimpinan kampung dan aparatnya sering merasa masyarakat kampung tidak membutuhkan program pelatihan untuk membimbing masyarakat ke tujuan lebih baik dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat kampung.

Tentang jika ada pelatihan dari pemerintah kampung masyarakat kampung selalu mengikutinya, diperoleh jawaban terbanyak pada kategori jawaban tidak pernah sebanyak 18 responden atau 45%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab tidak pernah dikarenakan sangat jarang dan terbilang tidak pernah ada program pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan perekonomian masyarakat, dikarenakan pemerintah kampung yang belum menjalankan tugasnya secara maksimal dan pengelolaan dana anggaran kampung yang tidak terlalu jelas dan terbuka untuk masyarakat kampung, demikian juga peran pemerintah kampung tidak berjalan secara merata kepada seluruh masyarakat.

3. Koordinasi dan Evaluasi

Koordinasi serta evaluasi dari pemerintah kampung dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung. Diperoleh jawaban pada kategori jawaban terbanyak adalah kategori jawaban tidak pernah sebanyak 19 responden atau 47,5%. Hal ini menunjukkan koordinasi dan evaluasi dari pemerintah kampung tidak berjalan dengan baik, hal ini juga dikarenakan pemerintah kampung yang bekerja hanya fokus pada pelayanan pada kantor kampung, dan sangat jarang untuk mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk masyarakat kampung untuk meningkatkan kemampuan di bidang perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Wadio yaitu Fungsi peran kepala kampung sebagai pimpinan kampung tidak berjalan dengan maksimal dalam hal pemberian motivasi, semangat dan dorongan kepada masyarakat untuk hal – hal meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kampung. Kepala kampung kurang bersosialisasi dengan masyarakat kampung dan hanya pada orang – orang tertentu saja. Kepala kampung sebagai salah satu fasilitator pada kampung tidak menjalankan tugasnya dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas penambah untuk menunjang pekerjaan masyarakat. Sebagai pimpinan kampung, kepala kampung belum memiliki kemampuan menggerakkan masyarakat kampung dalam kegiatan – kegiatan kampung. Kurangnya pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan perekonomian masyarakat kampung. Pemerintah kampung tidak atau jarang mengadakan pelatihan atau

pembinaan sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal koordinasi dan evaluasi pemerintah kampung tidak berjalan dengan baik atau terbilang tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R., dan Rahayu. S. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *e-Proceeding of Management Vol. 6, No. (2):3190.*
- A. Simarmata. 1998. *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI), Cet. Ke,1.
- Anto Dajan, 1986. *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta : LP3ES.
- Faozan Fahrul., Muhammad Arfan., Darwanis. 2013. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* , 76-85.
- Hariyadi, P. 2018. "Utilization of Modified White Corn Starch in Producing Marshmallow Cream". *Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry*, 3(2), 40–46.
- Hakim, 2018. hubungan tingkat sosial ekonomi : pendidikan, penghasilan, dan fasilitas dengan pencegahan komplikasi kronis pada penyandang diabetes melitus tipe 2 di surakarta. diakses dari tanggal 12 mei 2023. <http://eprints.ums.ac.id/66356/1/naskah%20publikasi.pdf>
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.
- Kurnia, E., & Maulana, I. 2019. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 209–218.
- Kartasmita Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya ; Bandung
- Mubyarto dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : lembaga Suluh Nusantara.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunanto. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap Pdrb Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota Di Provinsis Jawa Tengah Tahun 2007-2010. *Diponegoro Journal of Economics Volume 2 Nomor 4*.
- Siagian, Salim. 1999. Peranan Kewirausahaan dalam Pengembangan Koperasi. *Majalah Usahawan No.07 TH.XXVIII Juli 1999*. Jakarta : Lembaga. Manajemen FE-UI.
- Soeharto Prawirokusumo. 2001. *Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta : BPFE.

- Sekaran, Uma. 1992. "Research Methods for Business". Third Edition. Southern Illionis University.
- Singarimbun, M. 2006. Metode penelitian Survei. Jakarta : LP3ES.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2002. Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2004. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Wahyudi Dkk, 2019. Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Sinar Grafika,.
- Winarno Surakhmad. 1987. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Bandung, Tarsito.
- Zulkarnain. 2006. Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Penduduk Miskin. Yogyakarta : Adi Cipta Karya.